

DAFTAR PUSTAKA

- Asmarani, N. G. (23 Maret 2020). *Apa Itu Kepatuhan Pajak?*. DDTC News. <https://news.ddtc.co.id/apa-itu-kepatuhan-pajak-19757>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2020). *Siaran Pers Nomor 02 Tahun 2020 tentang 1 APRIL 2020, NPWP BENDAHARA DIGANTI NPWP INSTANSI PEMERINTAH*.
- Direktorat Jenderal Pajak. (n.d.). *Saluran Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak*. Diakses tanggal 11 Mei 2022, dari <https://www.pajak.go.id/id/saluran-pendaftaran-nomor-pokok-wajib-pajak-1>
- Direktorat Jenderal Pajak. (n.d.). *Syarat Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak*. Diakses tanggal 11 Mei 2022, dari <https://www.pajak.go.id/id/syarat-pendaftaran-nomor-pokok-wajib-pajak>
- Hapsari, A., & Kholis, N. (2020). Analisis Faktor-Faktor Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Karanganyar. *Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia*, 4(1), 56-67.
- Harjowiryo, M. (2020). Determinan Kepatuhan Bendahara Pemerintah dalam Menyetorkan Penerimaan Pajak. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, 5(4), 285-310.
- Hidayat. (1986). *Konsep Dasar dan Pengertian Produktivitas serta Interpretasi Hasil*. Jakarta: Prisma.
- Laporan Praktik Kerja Lapangan KPP Pratama Banyuwangi. (2022).
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 24 Tahun 2021 tentang *Bentuk dan Tata Cara Pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Serta Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian, Dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Unifikasi*.
- Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 184 Tahun 2020 tentang *Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak*.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143 Tahun 2020 tentang *Pemberian Fasilitas Pajak terhadap Barang dan Jasa yang Diperlukan Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan Perpanjangan Pemberlakuan Fasilitas Pajak Penghasilan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231 Tahun 2019 tentang *Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Serta Pemotongan dan/atau Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Bagi Instansi Pemerintah*.
- Redaksi DDTC News. (03 Februari 2020). *Ini Pernyataan Resmi DJP Soal Dihapusnya NPWP Bendahara Pemerintah*. DDTC News. <https://news.ddtc.co.id/ini-pernyataan-resmi-djp-soal-dihapusnya-npwp-bendahara-pemerintah-18717>
- Redaksi DDTC News. (10 September 2021). *Mulai Sekarang, NPWP Instansi Pemerintah Sudah Wajib Digunakan*. DDTC News.

<https://news.ddtc.co.id/mulai-sekarang-npwp-instansi-pemerintah-sudah-wajib-digunakan-32728>

Rogers-Glabush, J. (2015). *IBFD International Tax Glossary*. Amsterdam: The Netherlands-IBFD.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang *Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.

Waluyo, T. (2020). Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang Tidak Menyampaikan SPT, Ketentuan dan Pemilihannya sesuai SE-15/PJ/2018. *Simposium Nasional Keuangan Negara 2020*, 677-698.